



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014 - 2019

KATA PENGANTAR

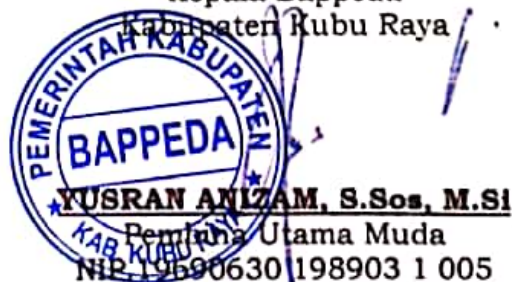
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang di dalamnya tertuang Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan yang memuat Program, Kegiatan dan indikator kinerja (*input, output* serta *outcome*), yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Dengan menyadari Pentingnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka dalam penyusunannya melibatkan unsur pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag/Kasubbid serta staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya guna mendapat masukan, pandangan, ide dan gagasan yang selanjutnya dituangkan dalam satu pemikiran dan konsep guna pencapaian tujuan organisasi yang efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di jalankan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya guna mewujudkan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional.

Sungai Raya, 2017
Kepala Bappeda
Kabupaten Kubu Raya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB 2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	5
2.1.1. Tugas dan Fungsi	6
2.1.2. Struktur Organisasi	6
2.1.3. Tata Laksana	20
2.2. Sumber Daya Bappeda	21
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	23
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan Bappeda	23
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda	26
2.3.3. Jenis Pelayanan Bappeda	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	36
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42

BAB 4.	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	43
BAB 5.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda	45
BAB 6.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014-2019	48
BAB 7.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB 8.	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 21

Tabel 2.2. Sumber Daya Aparatur Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017 22

Tabel 2.3. Sumber Daya Aparatur Bappeda Berdasarkan Eselonering Tahun 2017 22

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya 27

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya 29

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda 44

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 46

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Kubu Raya 54

Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya	19
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya ini disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pejabat/staf di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2. Sumber Daya Bappeda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Bappeda

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
3. Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Program
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan, dan Perikanan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal
5. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

6. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
 - 2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

A. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sekretariat

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

2) Fungsi

- a) Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administrasi dan laporan keuangan Badan;
- b) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c) Pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
- b) Pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
- c) Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- d) Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- e) Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
- f) Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
- g) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h) Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan

- i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tata laksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
 - 2) Fungsi
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
 - d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - e) Pelaksanaan urusan hukum;
 - f) Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
 - 1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
 - 2) Fungsi
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;

- c) Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- d) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

1) Tugas Pokok

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c) Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d) Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;
- f) Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan
 - 1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.
 - 2) Fungsi
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - b) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
 - c) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
 - d) Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
 - g) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - h) Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - 2) Fungsi
 - a) Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d) Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;
 - e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - f) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g) Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bidang Perencanaan Program
- 1) Tugas Pokok
Melaksanakan dan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan Pemerintah Daerah.
 - 2) Fungsi
 - a) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;
 - b) Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;
 - c) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah;
 - d) Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan;
 - e) Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h) Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Ekonomi

1) Tugas Pokok

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e) Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi terdiri dari 2 (dua) sub bidang, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- d) Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di

bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;

- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d) Penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Sosial dan Budaya

1) Tugas Pokok

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e) Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya; dan

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari 2 (dua) sub bidang, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan transmigrasi;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- d) Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spritual.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d) Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Fisik dan Prasarana

1) Tugas Pokok

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- d) Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e) Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana;
- f) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari 2 (dua) sub bidang, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

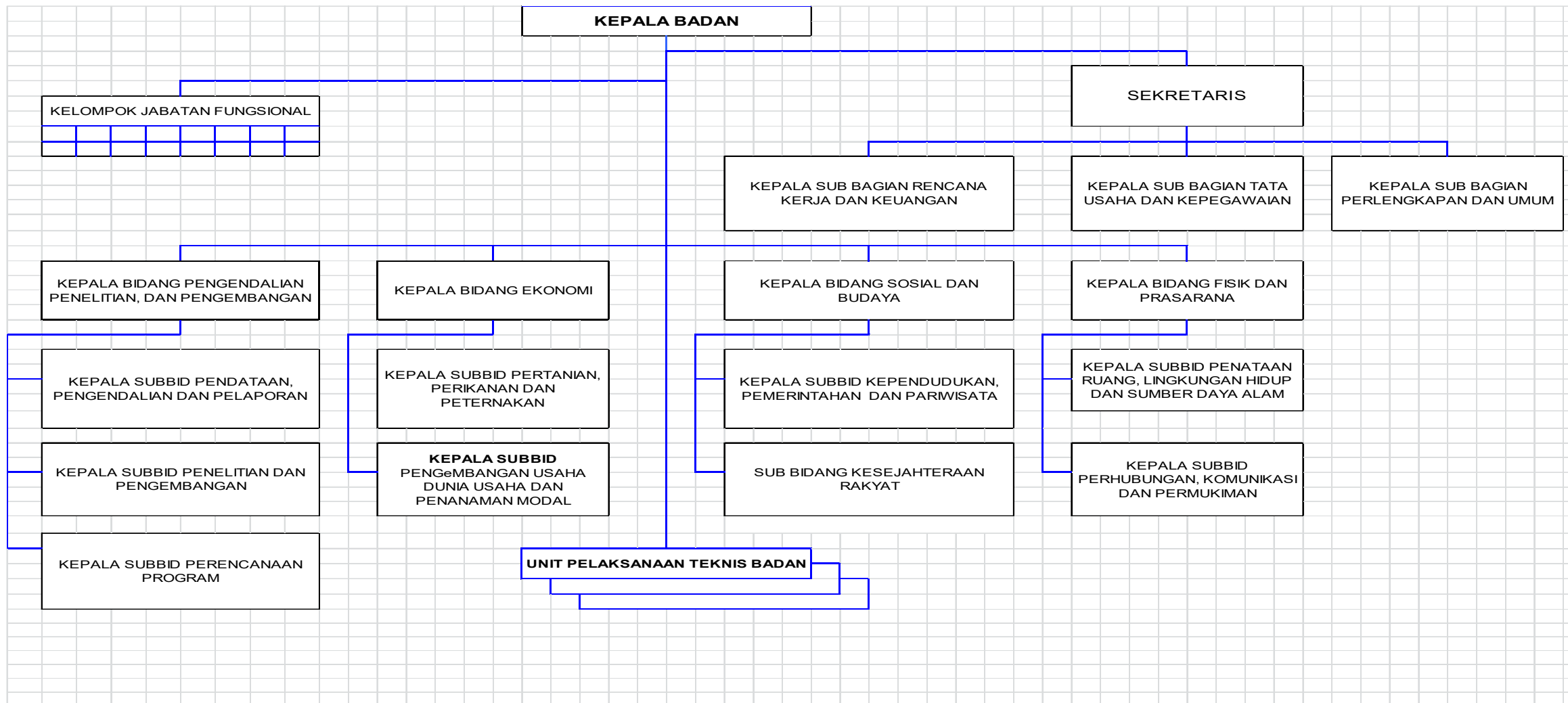
2) Fungsi

- a) Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d) Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman
 - 1) Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman.
 - 2) Fungsi
 - a) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;
 - b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - d) Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - e) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - f) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya

2.1.3. Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain di luar Bappeda, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *stakeholder* aspek perencanaan daerah.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengendalian surat masuk
- b. Pengendalian surat keluar
- c. Pelayanan tamu
- d. Pengamanan barang

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.

Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengembangan Dokumen Perencanaan
- b. Penyusunan Dokumen RPJD

- c. Penyusunan Dokumen RPJMD
- d. Penyusunan Dokumen RKPD
- e. Penyusunan Dokumen Renstra
- f. Penyusunan Dokumen Renja
- g. Layanan Informasi Tata Ruang/Wilayah
- h. Layanan Rekomendasi Tata Ruang/Wilayah

2.2. Sumber Daya Bappeda

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang PNS. Untuk memberikan gambaran kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN
KUBU RAYA BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	14 orang	38.88
2.	S-1	18 orang	50,00
3.	Diploma	2 orang	5,56
4.	SLTA	2 orang	5,56
5.	SLTP	0	0
Jumlah		36 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2017

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 50,00 % dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) yaitu 38.88%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BAPPEDA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2017

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	11 orang	30,56
2.	Penata	23 orang	63,89
3.	Pengatur	2 orang	5,55
4.	Juru	-	
Jumlah		36 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata atau 63,89%.

Selanjutnya sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2017

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	4 orang
4.	IV.a	12 orang
5.	Staf	18 orang
Jumlah		36 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Bappeda Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai

dengan Eselon IV.a sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 18 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Bappeda Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, ekonomi, fisik, prasarana dan tata ruang, dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 8 orang dengan berlatarbelakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, bahwa Bappeda Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Penunjang yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah yang sebelumnya sebagai Lembaga Teknis Daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), disamping pendekatan partisipatif (*participatory planning*), disamping menggunakan juga pendekatan :

1. Politis.
2. Teknokratis.

3. Partisipatif.
4. Atas-Bawah (*Top-Down*).
5. Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* adalah untuk mendorong partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan berdasarkan kebutuhan/aspirasi masyarakat, sedangkan perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan

pembangunan. Dengan demikian, perencanaan “dari atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”. Demikian pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Penyusunan rencana.
2. Penetapan rencana.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah, yaitu :

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Bappeda kabupaten Kubu Raya 2014-2016, dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	-	-	85 %	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	85 %	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	100,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	-	-	75,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	-	-	90,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	-	-	90,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Predikat (Nilai) LAKIP Bappeda *)	-	-	A	B	B	BB	A	A	B	B	BB	A	A	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan : *) : Bukan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan pada masa periode akhir perencanaan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan*, RTRW, *data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tabel 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA	6.521.371.239	5.428.086.263	7.616.923.456	10.182.002.150	7.668.985.715	5.467.989.361	4.966.687.897	7.243.136.294	10.041.518.972	7.546.396.647	83,85%	91,50%	95,09%	98,62%	98,40%	3,30%	6,66%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.397.029.084	2.546.594.023	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	2.321.879.778	2.327.456.272	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	96,86%	91,39%	100,00%	100,00%	100,00%	7,34%	8,03%
1.1.	Belanja Pegawai	2.397.029.084	2.546.594.023	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	2.321.879.778	2.327.456.272	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	96,86%	91,39%	100,00%	100,00%	100,00%	7,34%	8,03%
2.	BELANJA LANGSUNG	4.124.342.155	2.881.492.240	4.667.042.456	6.999.655.750	4.253.000.456	3.146.109.583	2.639.231.625	4.293.255.294	6.859.172.572	4.130.411.388	76,28%	91,59%	91,99%	97,99%	97,12%	0,62%	5,60%
2.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.477.200	433.547.200	493.817.056	378.654.250	372.080.018	409.983.953	356.852.573	428.316.419	340.499.176	346.360.303	84,28%	82,31%	86,74%	89,92%	93,09%	- 5,22%	- 3,32%
2.1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000	3.000.000	8.400.000	9.000.000	9.960.137	1.062.629	1.538.366	4.801.407	5.878.922	9.016.093	17,71%	51,28%	57,16%	84,87%	90,52%	10,67%	53,57%
2.1.2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	4.200.000	4.200.000	4.800.000	6.200.000	6.834.036	2.918.000	3.086.000	4.800.000	6.200.000	6.834.036	69,48%	73,48%	100,00%	100,00%	100,00%	10,23%	18,55%
2.1.3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.150.000	27.700.000	26.100.000	26.100.000	26.611.622	24.150.000	24.680.000	26.100.000	26.100.000	26.611.622	100,00%	89,10%	100,00%	100,00%	100,00%	1,96%	1,96%
2.1.4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.359.000	25.999.000	26.198.000	26.198.200	26.960.364	23.197.000	23.799.000	26.166.000	26.198.200	26.960.364	99,31%	91,54%	99,18%	100,00%	100,00%	2,91%	3,05%
2.1.5.	Penyediaan alat tulis kantor	22.583.200	22.583.200	24.867.600	19.799.850	19.159.360	22.312.650	22.583.200	24.867.600	19.799.850	19.159.360	98,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	- 3,23%	- 3,00%
2.1.6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.370.000	18.045.000	22.950.000	15.000.200	14.676.049	16.334.000	17.991.050	22.950.000	15.000.200	14.676.049	99,78%	99,70%	100,00%	100,00%	100,00%	- 2,16%	- 2,12%
2.1.7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.980.000	12.030.000	12.030.000	7.686.000	7.030.317	10.220.000	11.346.000	11.284.000	7.190.253	6.559.286	93,08%	94,31%	93,80%	93,55%	93,30%	- 8,53%	-8,49%
2.1.8.	Penyediaan makanan dan minuman	22.775.000	17.500.000	25.000.000	18.005.000	16.977.620	17.000.000	17.500.000	24.750.000	17.734.925	16.639.765	74,64%	100,00%	99,00%	98,50%	98,01%	- 5,71%	- 0,43%
2.1.9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	312.445.000	242.090.000	276.178.056	173.000.000	149.232.782	247.260.824	183.192.957	220.125.212	141.496.700	125.265.997	79,14%	75,67%	79,70%	81,79%	83,94%	- 13,74%	- 12,72%
2.1.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	43.615.000	60.400.000	61.060.000	77.665.000	89.716.581	36.178.000	51.136.000	56.380.000	74.900.126	89.716.581	82,95%	84,66%	92,34%	96,44%	100,00%	15,52%	19,92%
2.1.11.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	-	6.233.200	-	4.921.150	9.350.850	-	6.092.200	-	4.921.150	93,51%	-	97,74%	99,19%	100,00%	- 21,05%	-12,05%
2.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216.772.000	221.595.000	378.172.000	76.535.000	70.640.451	195.334.300	212.269.400	355.128.900	76.461.000	70.547.173	90,11%	95,79%	93,91%	99,90%	99,87%	- 20,09%	- 18,43%
2.2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	47.060.000	7.775.000	10.000.000	5.967.366	-	46.000.000	7.775.000	10.000.000	5.967.366	-	97,75%	100,00%	100,00%	100,00%	- 40,33%	- 39,99%
2.2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	65.647.000	51.535.000	65.647.000	51.535.000	48.509.202	54.244.300	46.919.400	63.113.900	51.535.000	48.509.202	82,63%	91,04%	96,14%	100,00%	100,00%	- 5,87%	- 2,21%
2.2.3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.590.170	3.200.000	3.985.000	4.985.000	4.986.000	5.576.195	100,00%	99,63%	99,70%	99,72%	99,75%	11,80%	11,75%
2.2.4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.573.713	7.965.000	9.985.000	9.955.000	9.940.000	10.494.410	99,56%	99,85%	99,55%	99,40%	99,25%	5,74%	5,67%
2.2.5.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	65.000.000	280.375.000	-	-	-	63.380.000	259.975.000	-	-	-	97,51%	92,72%	-	-	107,69%	102,53%
2.2.6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	121.875.000	44.000.000	9.375.000	-	-	116.175.000	42.000.000	9.325.000	-	-	95,32%	95,45%	99,47%	-	-	- 57,47%	- 56,86%
2.2.7.	Pengadaan mebeleur	18.050.000	-	-	-	-	13.750.000	-	-	-	-	76,18%	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.260.000	18.051.000	-	50.000.000	-	7.040.000	17.238.000	-	47.750.000	-	96,97%	95,50%	-	95,50%	-	90,26%	89,29%
2.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	18.051.000	-	50.000.000	-	-	17.238.000	-	47.750.000	-	-	95,50%	-	95,50%	-	66,43%	66,43%
2.3.2.	Pengadaan pakaian olahraga	7.260.000	-	-	-	-	7.040.000	-	-	-	-	96,97%	-	-	-	-	-	-
2.4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116.729.900	64.189.900	91.434.100	50.679.600	42.349.604	69.817.150	43.133.586	91.233.100	36.569.730	30.962.065	59,81%	67,20%	99,78%	100,00%	100,00%	- 18,35%	- 15,01%
2.4.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	81.730.000	59.190.000	-	39.500.000	30.998.139	55.117.000	38.698.786	-	25.426.150	19.646.620	67,44%	65,38%	-	64,37%	63,38%	- 21,52%	- 18,64%
2.4.2.	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	4.999.900	4.999.900	5.638.000	5.638.000	5.809.865	4.252.850	4.434.800	5.473.000	5.638.000	5.809.865	85,06%	88,70%	97,07%	100,00%	100,00%	3,05%	6,44%
2.4.3.	Penyusunan analisis jabatan SKPD	-	-	5.541.600	5.541.600	5.541.600	-	-	5.505.600	5.505.580	5.505.580	-	-	99,35%	99,35%	99,35%	-	-
2.4.4.	Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	-	-	80.254.500	-	-	-	-	80.254.500	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-
2.4.5.	Diklat fungsional non gelar substantive	30.000.000	-	-	-	-	10.447.300	-	-	-	-	34,82%	-	-	-	100,00%	-	-
2.5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.570.600	38.756.700	36.118.700	37.193.100	33.536.602	38.996.300	35.665.950	34.197.100	34.964.399	30.957.587	58,58%	92,03%	94,68%	94,01%	92,34%	- 12,81%	- 4,51%
2.5.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	7.505.100	5.983.250	7.059.600	8.134.000	8.299.293	4.942.500	5.983.250	6.856.600	7.785.051	7.705.087	65,86%	100,00%	97,12%	95,71%	94,32%	2,03%	9,29%
2.5.2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.000.000	7.710.450	4.656.000	4.656.000	3.475.309	7.861.650	7.710.450	4.386.000	4.256.981	3.083.989	52,41%	100,00%	94,20%	91,43%	88,74%	- 23,36%	- 17,07%
2.5.3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	8.306.950	7.570.800	7.570.800	5.938.404	17.746.450	8.306.950	6.945.300	6.652.462	4.997.761	88,73%	100,00%	91,74%	87,87%	84,16%	- 21,56%	- 22,39%
2.5.4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	-	8.362.500	8.362.500	8.362.500	-	-	7.918.500	8.362.500	8.362.500	-	-	94,69%	100,00%	100,00%	-	1,84%
2.5.5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	14.065.500	6.912.950	8.469.800	8.469.800	7.461.096	8.445.700	6.912.950	8.090.700	7.907.405	6.808.250	60,05%	100,00%	95,52%	93,36%	91,25%	- 11,91%	- 4,22%
2.5.6.	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	-	9.843.100	-	-	-	-	6.752.350	-	-	-	-	68,60%	-	-	-	-	-
2.6.	Program Pengembangan Data/Informasi	567.715.150	353.718.250	372.270.000	898.405.800	396.742.808	515.022.050	339.673.975	335.499.200	871.381.630	367.561.221	90,72%	96,03%	90,12%	96,99%	92,64%	- 6,92%	-6,52%
2.6.1.	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	105.458.500	75.764.800	55.587.000	57.500.000	49.409.949	99.887.500	72.317.800	52.245.500	53.906.250	46.203.243	94,72%	95,45%	93,99%	93,75%	93,51%	- 14,07%	- 14,29%
2.6.2.	Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	97.105.500	12.825.025	53.638.500	135.500.000	147.269.619	80.191.600	12.565.025	47.671.500	123.426.950	137.476.189	82,58%	97,97%	88,88%	91,09%	93,35%	8,69%	11,38%
2.6.3.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	127.377.000	86.482.750	122.735.500	115.148.450	112.279.344	101.151.350	77.944.750	108.587.100	105.602.643	106.743.972	79,41%	90,13%	88,47%	91,71%	95,07%	- 2,49%	1,08%
2.6.4.	Pelayanan perizinan penelitian	-	7.037.150	7.010.500	15.960.600	20.970.077	-	7.028.100	6.886.600	15.548.817	20.261.288	-	99,87%	98,23%	97,42%	96,62%	31,39%	30,30%
2.6.5.	Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	-	28.100.000	35.800.000	40.408.374	-	-	27.000.000	34.400.220	38.828.407	-	-	96,09%	96,09%	96,09%	12,87%	12,87%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.6.6.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	126.702.300	-	-	-	-	126.702.300	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.7.	Penyusunan Updating Data Pokok	-	-	-	61.419.450	-	-	-	-	61.419.450	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.8.	Ekspose capaian pembangunan daerah	-	-	-	50.375.000	-	-	-	-	50.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.9.	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	168.698.000	154.690.075	41.980.500	-	26.405.445	166.037.000	152.949.900	31.430.500	-	18.048.122	98,42%	98,88%	74,87%	-	68,35%	- 37,10%	- 42,58%
2.6.10.	Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	-	13.218.000	-	-	-	-	11.958.000	-	-	-	-	90,47%	-	-	-	-
2.6.11.	Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.720.000	-	-	-	-	99,44%	-	-	-	-
2.6.12.	Pengumpulan data sosial budaya	19.076.150	15.176.150	-	-	-	18.254.600	15.126.100	-	-	-	95,69%	99,67%	-	-	-	-	-
2.6.13.	Workshop inovasi daerah	-	1.742.300	-	-	-	-	1.742.300	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.6.14.	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	50.000.000	-	-	-	-	49.500.000	-	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	-	-
2.6.15.	Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
2.7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	134.830.430	80.150.050	102.676.000	107.300.000	114.798.301	90.886.930	69.714.921	91.629.400	99.442.712	110.939.619	67,41%	86,98%	89,24%	92,68%	96,64%	- 3,17%	4,07%
2.7.1.	Penyusunan KUA dan PPAS	124.830.430	62.480.050	62.420.000	62.624.000	52.704.280	86.350.130	52.116.521	51.501.400	54.802.262	48.914.842	69,17%	83,41%	82,51%	87,51%	92,81%	- 15,84%	- 10,74%
2.7.2.	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	-	12.670.000	35.080.000	39.500.000	57.703.735	-	12.670.000	35.060.000	39.464.450	57.634.491	-	100,00%	99,94%	99,91%	99,88%	46,09%	46,04%
2.7.3.	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	10.000.000	5.000.000	5.176.000	5.176.000	4.390.286	4.536.800	4.928.400	5.068.000	5.176.000	4.390.286	45,37%	98,57%	97,91%	100,00%	100,00%	- 15,18%	- 0,65%
2.8.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	40.375.000	-	393.750.000	1.501.500.000	604.907.823	40.167.000	-	385.865.000	1.501.500.000	593.354.084	99,48%	-	98,00%	100,00%	98,09%	96,74%	96,05%
2.8.1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	-	-	-	250.375.000	-	-	-	-	250.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	500.375.000	-	-	-	-	500.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.5.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	40.375.000	-	245.375.000	-	604.907.823	40.167.000	-	241.825.000	-	593.354.084	99,48%	-	98,55%	-	98,09%	146,52%	145,37%
2.8.6.	Identifikasi kawasan kumuh perkotaan	-	-	148.375.000	-	-	-	-	144.040.000	-	-	-	-	97,08%	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.8.7.	Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.126.305.050	711.642.764	1.369.189.400	1.307.877.600	843.623.613	723.689.901	649.584.263	1.237.337.192	1.297.669.754	836.257.095	64,25%	91,28%	94,61%	99,22%	99,13%	- 5,62%	2,93%
2.9.1.	Penyusunan rancangan RKPD	48.179.150	59.458.414	47.515.000	67.401.000	73.302.391	39.490.550	59.378.414	47.200.000	67.401.000	73.302.391	81,97%	99,87%	99,34%	100,00%	100,00%	8,76%	13,17%
2.9.2.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	266.648.250	238.018.000	278.991.500	240.119.000	233.909.830	222.983.900	237.235.999	274.459.000	240.119.000	233.909.830	83,62%	99,67%	98,38%	100,00%	100,00%	- 2,59%	0,96%
2.9.3.	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	125.890.550	149.771.000	61.935.000	90.621.000	83.471.416	51.409.400	122.009.000	50.833.200	90.621.000	83.471.416	40,84%	81,46%	82,08%	100,00%	100,00%	- 7,89%	10,18%
2.9.4.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	207.599.800	59.602.150	-	130.446.000	111.728.863	135.142.400	56.117.650	-	130.446.000	111.728.863	65,10%	94,15%	-	100,00%	100,00%	- 14,35%	- 4,65%
2.9.5.	Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	141.982.000	2.100.900	42.464.300	48.151.400	36.745.387	123.492.376	2.100.900	39.518.300	45.830.503	35.771.634	86,98%	100,00%	93,06%	95,18%	97,35%	- 23,69%	- 21,95%
2.9.6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	-	54.867.900	70.260.000	87.083.500	101.580.042	-	54.611.900	69.937.500	86.691.624	101.133.090	-	99,53%	99,54%	99,55%	99,56%	16,65%	16,65%
2.9.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	-	39.768.500	93.433.900	79.893.000	100.808.829	-	39.678.500	92.673.900	79.014.177	99.407.586	-	99,77%	99,19%	98,90%	98,61%	26,18%	25,81%
2.9.8.	Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	90.187.000	28.750.000	16.232.477	-	-	84.869.500	27.053.750	15.274.761	-	-	94,10%	94,10%	94,10%	- 43,54%	- 43,54%
2.9.9.	Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	-	-	150.519.500	80.000.000	58.322.831	-	-	141.264.731	75.080.000	54.735.977	-	-	93,85%	93,85%	93,85%	- 27,10%	- 27,10%
2.9.10.	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	-	-	-	6.670.500	-	-	-	-	6.670.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.11.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	60.735.200	-	-	-	-	60.735.200	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.13.	Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD- Perubahan Tahun 2014- 2019	-	-	-	49.255.500	-	-	-	-	49.255.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.14.	Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	-	-	-	188.751.500	-	-	-	-	188.751.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.15.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	144.932.000	-	-	-	-	123.250.340	-	-	-	-	85,49%	-	-	-	-
2.9.16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	-	-	8.617.800	-	8.617.800	-	-	7.966.800	-	8.617.800	-	-	92,45%	-	100,00%-	-	4,01%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.9.17.	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	84.372.300	-	-	-	-	64.182.588	-	-	-	-	76,07%	-	-	-	-
2.9.18.	Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	58.141.200	-	35.313.700	-	27.521.547	0	-	28.454.700	-	27.521.547	0,00%	-	80,58%	-	100,00%	- 22,07%	- 1,65%
2.9.19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	-	-	89.678.500	-	-	-	-	80.126.500	-	-	-	-	89,35%	-	-	-	-
2.9.20.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	-	-	170.968.900	-	-	-	-	132.600.133	-	-	-	-	77,56%	-	-	-	-
2.9.21.	Penyusunan Renja SKPD	-	9.371.850	-	-	-	-	9.371.850	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.9.22.	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	92.086.800	34.405.300	-	-	-	76.621.125	27.328.300	-	-	-	83,21%	79,43%	-	-	-	-	-
2.9.23.	Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	4.054.750	-	-	-	-	4.054.750	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.9.24.	Review RPJMD 2014-2019	-	60.224.000	-	-	-	-	37.697.000	-	-	-	-	62,59%	-	-	-	-	-
2.9.25.	Penyusunan Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	125.032.750	-	-	-	-	25.147.750	-	-	-	-	20,11%	-	-	-	-	-	-
2.9.26.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	60.744.550	-	-	-	-	49.402.400	-	-	-	-	81,33%	-	-	-	-	-	-
2.9.27.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.28.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019	-	-	-	-	170.968.900	-	-	-	-	170.968.900	-	-	-	-	100,00%	-	-
2.10.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	409.878.025	420.927.200	451.968.500	1.755.797.700	531.503.233	361.434.425	403.864.754	424.645.482	1.734.444.137	516.799.695	88,18%	95,95%	93,95%	98,78%	97,23%	5,33%	7,41%
2.10.1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	91.505.800	231.562.400	180.425.000	177.052.000	208.816.057	73.407.700	218.843.954	163.187.982	166.676.753	207.354.345	80,22%	94,51%	90,45%	94,14%	99,30%	17,94%	23,08%
2.10.2.	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	-	-	81.066.500	80.118.500	79.648.665	-	-	76.744.500	75.848.184	75.403.391	-	-	94,67%	94,67%	94,67%	- 0,59%	- 0,59%
2.10.3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	138.749.000	133.040.000	134.640.000	133.627.200	132.376.569	137.689.000	133.040.000	134.640.000	133.627.200	132.376.569	99,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	- 0,94%	- 0,78%
2.10.4.	Monitoring dan evaluasi investasi	-	-	55.837.000	65.000.000	70.130.833	-	-	50.073.000	58.292.000	62.893.331	-	-	89,68%	89,68%	89,68%	7,89%	7,89%
2.10.5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	108.773.225	56.324.800	-	-	40.531.109	93.451.725	51.980.800	-	-	38.772.059	85,91%	92,29%	-	-	95,66%	- 28,04%	- 25,42%
2.10.6.	Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	70.850.000	-	-	-	-	56.886.000	-	-	-	-	80,29%	-	-	-	-	-	-
2.10.7.	Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10.8.	Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.9.	Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.10.	Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.11.	Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.12.	Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.13.	Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.11.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	389.504.050	90.343.750	282.241.500	182.697.000	560.468.594	222.943.550	77.941.650	262.264.996	182.697.000	560.468.594	57,24%	86,27%	92,92%	100,00%	100,00%	7,55%	20,25%
2.11.1.	Fasilitasi pelayanan sosial dasar	-	-	-	80.000.000	96.668.533	-	-	-	80.000.000	96.668.533	-	-	-	100,00%	100,00%	9,93%	9,93%
2.11.2.	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	-	-	-	102.697.000	123.236.400	-	-	-	102.697.000	123.236.400	-	-	-	100,00%	100,00%	9,54%	9,54%
2.11.3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	160.652.900	90.343.750	282.241.500	-	340.563.661	99.621.600	77.941.650	262.264.996	-	340.563.661	62,01%	86,27%	92,92%	-	100,00%	20,66%	35,98%
2.11.4.	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	107.329.900	-	-	-	-	40.624.500	-	-	-	-	37,85%	-	-	-	-	-	-
2.11.5.	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	121.521.250	-	-	-	-	82.697.450	-	-	-	-	68,05%	-	-	-	-	-	-
2.12.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	273.128.050	239.337.400	271.796.400	332.607.000	351.421.018	230.525.849	230.861.428	263.005.005	332.607.000	351.421.018	84,40%	96,46%	96,77%	100,00%	100,00%	5,17%	8,80%
2.12.1.	Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	155.404.800	121.728.900	127.625.500	157.406.600	157.911.066	134.715.800	121.150.900	125.265.500	157.406.600	157.911.066	86,69%	99,53%	98,15%	100,00%	100,00%	0,32%	3,23%
2.12.2.	Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	117.723.250	117.608.500	144.170.900	175.200.400	193.509.952	95.810.049	109.710.528	137.739.505	175.200.400	193.509.952	81,39%	93,28%	95,04%	100,00%	100,00%	10,45%	15,10%
2.13.	Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-			2,55%	2,55%
2.13.1.	Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-	100,00%	100,00%	2,55%	2,55%
2.14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	-	-	20.424.500	25.533.700	25.592.960	-	-	17.016.300	22.470.634	22.552.477	-	-	83,31%	88,00%	88,12%	7,81%	9,84%
2.14.1.	Penyusunan database E-Formasi	-	-	4.316.500	4.524.500	4.632.229	-	-	4.301.000	4.508.212	4.615.553	-	-	99,64%	99,64%	99,64%	2,38%	2,38%
2.14.2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	4.995.300	4.995.100	4.995.300	-	-	4.665.300	4.964.630	4.964.829	-	-	93,39%	93,39%	93,39%	0,00%	2,10%
2.14.3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	5.789.900	5.691.300	5.642.631	-	-	3.057.200	3.005.006	2.979.309	-	-	52,80%	52,80%	52,80%	- 0,86%	- 0,86%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.14.4.	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2.14.5.	Penyusunan Standar Pelayanan	-	-	5.322.800	5.322.800	5.322.800	-	-	4.992.800	4.992.786	4.992.786	-	-	93,80%	93,80%	93,80%	0,00%	0,00%
2.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	213.746.700	189.767.100	282.604.800	194.500.000	199.770.943	194.865.525	182.965.199	267.357.000	180.340.400	186.665.969	91,17%	96,42%	94,60%	92,72%	93,44%	- 1,34%	- 0,86%
2.15.1.	Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	174.770.750	184.514.100	184.991.300	194.500.000	199.770.943	157.090.250	177.712.199	170.187.500	180.340.400	186.665.969	89,88%	96,31%	92,00%	92,72%	93,44%	2,71%	3,51%
2.15.2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	5.253.000	97.613.500	-	-	-	5.253.000	97.169.500	-	-	-	100,00%	99,55%	-	-	-	-
2.15.3.	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	6.262.350	-	-	-	-	6.262.350	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
2.15.4.	Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	32.713.600	-	-	-	-	31.512.925	-	-	-	-	96,33%	-	-	-	-	-	-
2.16.	Program Kerjasama Pembangunan	75.050.000	19.465.926	120.579.500	-	-	45.402.650	19.465.926	99.760.200	-	-	60,50%	100,00%	82,73%	-	-	-	-
2.16.1.	Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	75.050.000	19.465.926	81.505.500	-	-	45.402.650	19.465.926	60.786.200	-	-	60,50%	100,00%	74,58%	-	-	-	-
2.16.2.	Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	-	-	39.074.000	-	-	-	-	38.974.000	-	-	-	-	99,74%	-	-	-	-

2.3.3. Jenis Pelayanan Bappeda

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur.
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana.
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, maupun horizontal yakni antar SKPD.
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam melaksanakan pelayanan, Bappeda harus dapat menjawab tantangan yang muncul, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat dan tepat.
2. Tuntutan masyarakat terhadap prosedur perijinan yang cepat dan sederhana.

3. Kebutuhan informasi referensi hasil-hasil penelitian.
4. Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu.
5. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perencanaan dan evaluasi.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Komitmen perencanaan pembangunan daerah berbasis HITS dengan memperkuat pendekatan teknokratis.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.
6. Menyiapkan kajian makro yang bersifat strategis untuk mendukung persyaratan teknis usulan DAK Fisik/Dana APBN lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final.
2. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh SKPD.
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan.
6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “***Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju Harmonis, Berbudaya Dan Berdaya Saing***”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*good government*).
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas.
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
8. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
9. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
10. Pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta.
11. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
12. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
14. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Institusi perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing.

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah :

1. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
2. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Bappeda kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan *stakeholders* terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW Tahun 2016-

2036, RPJPD Tahun 2009-2019, RPJMD I (2009 – 2014), maupun RPJMD II (2014 – 2019), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan.
5. Belum optimalnya hasil riset dan kaji terap sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kubu Raya. Tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah **Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD.**

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran. Sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah **Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Kubu Raya ini diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan, serta mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya, terutama Misi Pertama dan Misi Keempat.

Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
				2	Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
				3	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				4	Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
				5	Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%
				6	Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Predikat (Nilai) LAKIP Bappeda	B	B	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Bappeda tahun 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing							
MISI 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)							
Sasaran di RPJMD-P : S.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan nilai SAKIP Bappeda	1	Meningkatkan komitmen pejabat/staf di lingkungan Bappeda mampu memenuhi penilaian LAKIP Bappeda peringkat “A”
MISI 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat							
Sasaran di RPJMD-P : S.14. Meningkatkan pengelolaan tata ruang wilayah							
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Meningkatkan perencanaan tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW	1	Meningkatkan dan mendorong penetapan perencanaan pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW harus memperhatikan kebutuhan ruang sesuai dengan dinamika masyarakat dan kepentingan <i>stakeholders</i> dalam kurun waktu 20 tahun ke depan
				2	Meningkatkan jumlah kajian/penelitian yang dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan	1	Meningkatkan dan mendorong kegiatan kajian/penelitian agar dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan
				3	Meningkatkan persentase kesesuaian program dan kegiatan dalam APBD	1	Meningkatkan dan mendorong SKPD agar dalam penyusunan APBD harus menyesuaikan antara program dan kegiatan

				4	Meningkatkan persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	1	Meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan
				5	Meningkatkan persentase kesesuaian RPJMD dan Renstra dalam perencanaan pembangunan	1	Meningkatkan dan mendorong SKPD agar menyesuaikan antara RPJMD dan Renstra dalam proses perencanaan pembangunan
				6	Meningkatkan persentase kesesuaian Renstra dan Renja dalam perencanaan pembangunan	1	Meningkatkan dan mendorong SKPD agar menyesuaikan antara Renstra dan Renja dalam proses perencanaan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2014-2019

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya
 - Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP
 - Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana
 - Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan

- Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD
 - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata
 - Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019
 - Review RPJMD 2014-2019
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan
 - Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019
 - Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan
 - Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
 - Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya
 - Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan
 - Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)
 - Penyusunan Renja SKPD
 - Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
2. Program Kerjasama Pembangunan
- Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah
 - Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah
3. Program Pengembangan Data/Informasi
- Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya

- Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - Pelayanan perizinan penelitian
 - Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Updating Data Pokok
 - Ekspose capaian pembangunan daerah
 - Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya
 - Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya
 - Pengumpulan data sosial budaya
 - Workshop inovasi daerah
 - Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya
4. Program Penelitian dan Pengembangan
- Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah
5. Program Perencanaan Sosial Budaya
- Fasilitasi pelayanan sosial dasar
 - Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs
 - Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
 - Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 - Monitoring dan evaluasi investasi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi
 - Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi
 - Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan

- Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan
 - Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat
 - Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya
7. Program Perencanaan Tata Ruang
- Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
 - Koordinasi dan fasiltasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
 - Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya
 - Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019
 - Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya
 - Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya
 - Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya
 - Identifikasi kawasan kumuh perkotaan
 - Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur *Public Private Partnership* di Kabupaten Kubu Raya

Sasaran Kedua : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian olahraga
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Penyusunan evaluasi jabatan SKPD
 - Penyusunan analisis jabatan SKPD
 - Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD
 - Diklat fungsional non gelar substantif
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
 - Penyusunan database E-Formasi
 - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Penyusunan Standar Pelayanan
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA
 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
 - Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan KUA dan PPAS
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD
 - Fasilitasi penataan aset pada SKPD

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100%	1.126.305.050	100%	711.642.764	100%	1.369.189.400	100%	1.307.877.600	100%	1.023.210.313	100%	5.538.225.127	Bappeda	KKR
		1.1.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	-	1 Dokumen	48.179.150	1 Dokumen	59.458.414	1 Dokumen	47.515.000	1 Dokumen	67.401.000	1 Dokumen	73.302.391	5 Dokumen	295.855.955	Bappeda	KKR
		1.2.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	1 Kegiatan	266.648.250	1 Kegiatan	238.018.000	1 Kegiatan	278.991.500	1 Kegiatan	240.119.000	1 Kegiatan	233.909.830	5 Kegiatan	1.257.686.580	Bappeda	KKR
		1.3.	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	125.890.550	1 Kegiatan	149.771.000	1 Kegiatan	61.935.000	1 Kegiatan	90.621.000	1 Kegiatan	83.471.416	5 Kegiatan	511.688.966	Bappeda	KKR
		1.4.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	Jumlah laporan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	-	1 Dokumen	207.599.800	1 Dokumen	59.602.150	-	-	1 Dokumen	130.446.000	1 Dokumen	111.728.863	4 Dokumen	509.376.813	Bappeda	KKR
		1.5.	Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan publikasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	4 Dokumen	141.982.000	4 Dokumen	2.100.900	4 Dokumen	42.464.300	4 Dokumen	48.151.400	4 Dokumen	36.745.387	20 Dokumen	271.443.987	Bappeda	KKR
		1.6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	-	-	-	1 Dokumen	54.867.900	1 Dokumen	70.260.000	1 Dokumen	87.083.500	1 Dokumen	101.580.042	4 Dokumen	313.791.442	Bappeda	KKR
		1.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	-	-	-	1 Dokumen	39.768.500	1 Dokumen	93.433.900	1 Dokumen	79.893.000	1 Dokumen	100.808.829	4 Dokumen	313.904.229	Bappeda	KKR
		1.8.	Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 9 Kecamatan dan 36 SKPD	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	90.187.000	1 Kegiatan	28.750.000	1 Kegiatan	16.232.477	3 Kegiatan	135.169.477	Bappeda	KKR
		1.9.	Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.519.500	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	58.322.831	3 Dokumen	288.842.331	Bappeda	KKR
		1.10.	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	6.670.500	-	-	1 Dokumen	6.670.500	Bappeda	KKR
		1.11.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	60.735.200	-	-	1 Dokumen	60.735.200	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	Bappeda	KKR
		1.13.	Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	Jumlah dokumen Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	49.255.500	-	-	1 Dokumen	49.255.500	Bappeda	KKR
		1.14.	Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	188.751.500	-	-	1 Kegiatan	188.751.500	Bappeda	KKR
		1.15.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	144.932.000	-	-	-	-	1 Dokumen	144.932.000	Bappeda	KKR
		1.16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	8.617.800	-	-	1 Dokumen	8.617.800	2 Dokumen	17.235.600	Bappeda	KKR
		1.17.	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	84.372.300	-	-	-	-	1 Dokumen	84.372.300	Bappeda	KKR
		1.18.	Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	58.141.200	-	-	1 Dokumen	35.313.700	-	-	1 Dokumen	27.521.547	3 Dokumen	120.976.447	Bappeda	KKR
		1.19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	89.678.500	-	-	-	-	1 Kegiatan	89.678.500	Bappeda	KKR
		1.20.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Perubahan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	170.968.900	-	-	-	-	1 Dokumen	170.968.900	Bappeda	KKR
		1.21.	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	-	-	-	1 Dokumen	9.371.850	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	9.371.850	Bappeda	KKR
		1.22.	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	-	1 Kegiatan	92.086.800	1 Kegiatan	34.405.300	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	126.492.100	Bappeda	KKR
		1.23.	Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	1 Kegiatan	4.054.750	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	4.054.750	Bappeda	KKR
		1.24.	Review RPJMD 2014-2019	Jumlah dokumen Review RPJMD 2014-2019	-	-	-	1 Dokumen	60.224.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	60.224.000	Bappeda	KKR
		1.25.	Penyusunan Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	125.032.750	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	125.032.750	Bappeda	KKR
		1.26.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	Jumlah kegiatan sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	-	1 Kegiatan	60.744.550	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	60.744.550	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.27.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	Bappeda	KKR
		1.28.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	170.968.900	1 Dokumen	170.968.900	Bappeda	KKR	
		2.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan	-	100%	75.050.000	100%	19.465.926	100%	120.579.500	-	-	-	-	100%	215.095.426	Bappeda	KKR
		2.1.	Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	-	1 Kegiatan	75.050.000	1 Kegiatan	19.465.926	1 Kegiatan	81.505.500	-	-	-	-	3 Kegiatan	176.021.426	Bappeda	KKR
		2.2.	Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	39.074.000	-	-	-	-	1 Kegiatan	39.074.000	Bappeda	KKR
		3.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	-	100%	567.715.150	100%	353.718.250	100%	372.270.000	100%	898.405.800	100%	396.742.808	100%	2.588.852.008	Bappeda	KKR
		3.1.	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	105.458.500	1 Dokumen	75.764.800	1 Dokumen	55.587.000	1 Dokumen	57.500.000	1 Dokumen	49.409.949	5 Dokumen	343.720.249	Bappeda	KKR
		3.2.	Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan sistem data tematik untuk pemanfaatan ruang yang terpadu di Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	97.105.500	1 Kegiatan	12.825.025	1 Kegiatan	53.638.500	1 Kegiatan	135.500.000	1 Kegiatan	147.269.619	5 Kegiatan	446.338.644	Bappeda	KKR
		3.3.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	1 Kegiatan	127.377.000	1 Kegiatan	86.482.750	1 Kegiatan	122.735.500	1 Kegiatan	115.148.450	1 Kegiatan	112.279.344	5 Kegiatan	564.023.044	Bappeda	KKR
		3.4.	Pelayanan perizinan penelitian	Jumlah kegiatan fasilitasi proses pelayanan perizinan penelitian	-	-	-	1 Kegiatan	7.037.150	1 Kegiatan	7.010.500	1 Kegiatan	15.960.600	1 Kegiatan	20.970.077	4 Kegiatan	50.978.327	Bappeda	KKR
		3.5.	Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	28.100.000	1 Kegiatan	35.800.000	1 Kegiatan	40.408.374	3 Kegiatan	104.308.374	Bappeda	KKR
		3.6.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	126.702.300	-	-	2 Dokumen	126.702.300	Bappeda	KKR
		3.7.	Penyusunan Updating Data Pokok	Jumlah dokumen Updating Data Pokok Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	61.419.450	-	-	1 Dokumen	61.419.450	Bappeda	KKR
		3.8.	Ekspose capaian pembangunan daerah	Jumlah kegiatan ekspose capaian pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50.375.000	-	-	1 Kegiatan	50.375.999	Bappeda	KKR
		3.9.	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	168.698.000	1 Dokumen	154.690.075	1 Dokumen	41.980.500	-	-	1 Dokumen	26.405.445	4 Dokumen	391.774020	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.10.	Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	13.218.000	-	-	-	-	1 Dokumen	13.218.000	Bappeda	KKR
		3.11.	Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	Bappeda	KKR
		3.12.	Pengumpulan data sosial budaya	Jumlah kegiatan pengumpulan data sosial budaya	-	1 Kegiatan	19.076.150	1 Kegiatan	15.176.150	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	34.252.300	Bappeda	KKR
		3.13.	Workshop inovasi daerah	Jumlah kegiatan workshop inovasi daerah	-	-	-	1 Kegiatan	1.742.300	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.742.300	Bappeda	KKR
		3.14.	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50.000.000	Bappeda	KKR
		3.15.	Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	300.000.000	-	-	1 Kegiatan	300.000.000	Bappeda	KKR
		4.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.375.000	100%	105.564.488	100%	205.939.488	Bappeda	KKR
		4.1.	Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.375.000	1 Dokumen	105.564.488	2 Dokumen	205.939.488	Bappeda	KKR
		5.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Perencanaan Sosial Budaya	-	100%	389.504.050	100%	90.343.750	100%	282.241.500	100%	182.697.000	100%	560.468.594	100%	1.505.254.894	Bappeda	KKR
		5.1.	Fasilitasi pelayanan sosial dasar	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan sosial dasar	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	96.668.533	2 Kegiatan	176.668.533	Bappeda	KKR
		5.2.	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	102.697.000	1 Kegiatan	123.236.400	2 Kegiatan	225.933.400	Bappeda	KKR
		5.3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	1 Kegiatan	160.652.900	1 Kegiatan	90.343.750	1 Kegiatan	282.241.500	-	-	1 Kegiatan	340.563.661	4 Kegiatan	873.801.811	Bappeda	KKR
		5.4.	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	-	1 Kegiatan	107.329.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	107.329.900	Bappeda	KKR
		5.5.	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	121.521.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	121.521.250	Bappeda	KKR
		6.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	100%	409.878.025	100%	420.927.200	100%	451.968.500	100%	1.755.797.700	100%	531.503.233	100%	3.570.074.658	Bappeda	KKR
		6.1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	1 Kegiatan	91.505.800	1 Kegiatan	231.562.400	1 Kegiatan	180.425.000	1 Kegiatan	177.052.000	1 Kegiatan	208.816.057	5 Kegiatan	889.361.257	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.2.	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	81.066.500	1 Kegiatan	80.118.500	1 Kegiatan	79.648.665	3 Kegiatan	240.833.665	Bappeda	KKR
		6.3.	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	138.749.000	1 Dokumen	133.040.000	1 Dokumen	134.640.000	1 Dokumen	133.627.200	1 Dokumen	132.376.569	5 Dokumen	672.432.769	Bappeda	KKR
		6.4.	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi investasi	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	55.837.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	70.130.833	3 Kegiatan	190.967.833	Bappeda	KKR
		6.5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	-	1 Kegiatan	108.773.225	1 Kegiatan	56.324.800	-	-	-	-	1 Kegiatan	40.531.109	3 Kegiatan	205.629.134	Bappeda	KKR
		6.6.	Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	Jumlah kegiatan penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	-	1 Kegiatan	70.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	70.850.000	Bappeda	KKR
		6.7.	Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bappeda	KKR
		6.8.	Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bappeda	KKR
		6.9.	Penyusunan kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pusat komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bappeda	KKR
		6.10.	Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	Jumlah dokumen kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bappeda	KKR
		6.11.	Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	Bappeda	KKR
		6.12.	Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	Bappeda	KKR
		6.13.	Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.00	-	-	1 Dokumen	200.000.000	Bappeda	KKR
		7.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	-	60,50%	213.746.700	70,00%	189.767.100	75,00%	282.604.800	80,00%	194.500.000	85,00%	199.770.943	85,00%	1.080.389.543	Bappeda	KKR
		7.1.	Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	174.770.750	1 Kegiatan	184.514.100	1 Kegiatan	184.991.300	1 Kegiatan	194.500.000	1 Kegiatan	199.770.943	5 Kegiatan	938.547.093	Bappeda	KKR
		7.2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	-	-	1 Kegiatan	5.253.000	1 Kegiatan	97.613.500	-	-	-	-	2 Kegiatan	102.866.500	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7.3.	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	1 Kegiatan	6.262.350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	6.262.350	Bappeda	KKR	
		7.4.	Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	-	1 Kegiatan	32.713.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	32.713.600	Bappeda	KKR
		8.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	20 Desa	273.128.050	20 Desa	239.337.400	20 Desa	271.796.400	20 Desa	332.607.000	20 Desa	351.421.018	100 Desa	1.468.289.868	Bappeda	KKR	
		8.1.	Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	-	20 Desa	155.404.800	20 Desa	121.728.900	20 Desa	127.625.500	20 Desa	157.406.600	20 Desa	157.911.066	100 Desa	720.076.866	Bappeda	KKR	
		8.2	Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	-	1 Kegiatan	117.723.250	1 Kegiatan	117.608.500	1 Kegiatan	144.170.900	1 Kegiatan	175.200.400	1 Kegiatan	193.509.952	1 Kegiatan	748.213.002	Bappeda	KKR	
		9.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	1 Dokumen	40.375.000	-	-	2 Dokumen	393.750.000	5 Dokumen	1.501.500.000	1 Dokumen	604.907.823	9 Dokumen	1.040.534.323	Bappeda	KKR	
		9.1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	Jumlah dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.375.000	-	-	1 Dokumen	250.375.000	Bappeda	KKR	
		9.2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.375.000	-	-	1 Dokumen	300.375.000	Bappeda	KKR	
		9.3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.375.000	-	-	1 Dokumen	500.375.000	Bappeda	KKR	
		9.4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.375.000	-	-	1 Dokumen	300.375.000	Bappeda	KKR	
		9.5.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	-	1 Dokumen	40.375.000	-	-	1 Dokumen	245.375.000	-	-	1 Dokumen	604.907.823	3 Dokumen	890.657.823	Bappeda	KKR	
		9.6.	Identifikasi kawasan kumuh perkotaan	Jumlah dokumen identifikasi kawasan kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	148.375.000	-	-	-	-	1 Dokumen	148.375.000	Bappeda	KKR	
		9.7.	Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur Public Private Partnership di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur Public Private Partnership di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bappeda	KKR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	10.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	486.477.200	100%	433.547.200	100%	493.817.056	100%	378.654.250	100%	372.080.018	100%	2.164.575.724	Bappeda	KKR
		10.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	-	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	8.400.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	9.960.137	5 Tahun	36.360.137	Bappeda	KKR
		10.2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	-	20 Unit	4.200.000	20 Unit	4.200.000	20 Unit	4.800.000	20 Unit	6.200.000	20 Unit	6.834.036	100 Unit	26.234.036	Bappeda	KKR
		10.3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	-	1 Tahun	24.150.000	1 Tahun	27.700.000	1 Tahun	26.100.000	1 Tahun	26.100.000	1 Tahun	26.611.622	5 Tahun	130.661.622	Bappeda	KKR
		10.4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1 Tahun	23.359.000	1 Tahun	25.999.000	1 Tahun	26.198.000	1 Tahun	26.198.200	1 Tahun	26.960.364	5 Tahun	128.714.564	Bappeda	KKR
		10.5.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	-	1 Tahun	22.583.200	1 Tahun	22.583.200	1 Tahun	24.867.600	1 Tahun	19.799.850	1 Tahun	19.159.360	5 Tahun	108.993.210	Bappeda	KKR
		10.6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	-	1 Tahun	16.370.000	1 Tahun	18.045.000	1 Tahun	22.950.000	1 Tahun	15.000.200	1 Tahun	14.676.049	5 Tahun	87.041.249	Bappeda	KKR
		10.7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan selama 1 tahun	-	1 Tahun	10.980.000	1 Tahun	12.030.000	1 Tahun	12.030.000	1 Tahun	7.686.000	1 Tahun	7.030.317	5 Tahun	49.756.317	Bappeda	KKR
		10.8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk tamu rapat pegawai dalam waktu 1 tahun	-	1 Tahun	22.775.000	1 Tahun	17.500.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	18.005.000	1 Tahun	16.977.620	5 Tahun	100.257.620	Bappeda	KKR
		10.9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	1 Tahun	312.445.000	1 Tahun	242.090.000	1 Tahun	276.178.056	1 Tahun	173.000.000	1 Tahun	149.232.782	5 Tahun	1.152.945.838	Bappeda	KKR
		10.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-	1 Tahun	43.615.000	1 Tahun	60.400.000	1 Tahun	61.060.000	1 Tahun	77.665.000	1 Tahun	89.716.581	5 Tahun	332.456.581	Bappeda	KKR
		10.11.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	1 Dokumen	10.000.000	-	-	1 Dokumen	6.233.200	-	-	1 Dokumen	4.921.150	3 Dokumen	21.154.350	Bappeda	KKR
		11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	216.772.000	100%	221.595.000	100%	378.172.000	100%	76.535.000	100%	70.640.451	100%	963.714.451	Bappeda	KKR
		11.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	1 Paket	47.060.000	1 Paket	7.775.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	5.967.366	4 Paket	70.802.366	Bappeda	KKR
		11.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	1 Paket	65.647.000	1 Paket	51.535.000	1 Paket	65.647.000	1 Paket	51.535.000	1 Paket	48.509.202	5 Paket	282.873.202	Bappeda	KKR
		11.3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	1 Paket	3.200.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.590.170	5 Paket	22.790.170	Bappeda	KKR
		11.4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	-	1 Paket	8.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.573.713	1 Paket	48.573.713	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		11.5.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan dinas/operasional	-	-	-	5 Unit	65.000.000	1 Unit	280.375.000	-	-	-	-	6 Unit	345.375.000	Bappeda	KKR
		11.6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	1 Paket	121.875.000	1 Paket	44.000.000	1 Paket	9.375.000	-	-	-	-	3 Paket	175.250.000	Bappeda	KKR
		11.7.	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	-	1 Paket	18.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	18.050.000	Bappeda	KKR
		12.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	7.260.000	100%	18.051.000	-	-	100%	50.000.000	-	-	100%	75.311.000	Bappeda	KKR
		12.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	1 Paket	18.051.000	-	-	1 Paket	50.000.000	-	-	2 Paket	68.051.000	Bappeda	KKR
		12.2.	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	-	1 Paket	7.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	7.260.000	Bappeda	KKR
		13.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	116.729.900	100%	64.189.900	100%	91.434.100	100%	50.679.600	100%	42.349.604	100%	365.383.104	Bappeda	KKR
		13.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	8 Orang	81.730.000	6 Orang	59.190.000	-	-	4 Orang	39.500.000	3 Orang	30.998.139	21 Orang	211.418.139	Bappeda	KKR
		13.2.	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan SKPD	-	1 Dokumen	4.999.900	1 Dokumen	4.999.900	1 Dokumen	5.638.000	1 Dokumen	5.638.000	1 Dokumen	5.809.865	5 Dokumen	27.085.665	Bappeda	KKR
		13.3.	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah dokumen analisis jabatan SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.541.600	1 Dokumen	5.541.600	1 Dokumen	5.541.600	3 Dokumen	16.624.800	Bappeda	KKR
		13.4.	Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	-	-	-	-	-	36 SKPD	80.254.500	-	-	-	-	36 SKPD	80.254.500	Bappeda	KKR
		13.5.	Diklat fungsional non gelar substantif	Jumlah kegiatan diklat fungsional non gelar substantif	-	1 Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	30.000.000	Bappeda	KKR
		14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	100%	20.424.500	100%	25.533.700	100%	25.592.960	100%	71.551.160	Bappeda	KKR
		14.1.	Penyusunan database E-Formasi	Jumlah dokumen database E-Formasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	4.316.500	1 Dokumen	4.524.500	1 Dokumen	4.632.229	3 Dokumen	13.473.229	Bappeda	KKR
		14.2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	-	-	-	1 Dokumen	4.995.300	1 Dokumen	4.995.100	1 Dokumen	4.995.300	3 Dokumen	14.985.700	Bappeda	KKR
		14.3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Zona Hijau pelayanan publik	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5.789.900	1 Kegiatan	5.691.300	1 Kegiatan	5.642.631	3 Kegiatan	17.123.831	Bappeda	KKR
		14.4.	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Bappeda	KKR
		14.5.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah dokumen Standar Pelayanan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.322.800	1 Dokumen	5.322.800	1 Dokumen	5.322.800	3 Dokumen	15.968.400	Bappeda	KKR
		15.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	66.570.600	100%	38.756.700	100%	36.118.700	100%	37.193.100	100%	33.536.602	100%	212.175.702	Bappeda	KKR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		15.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1 Dokumen	7.505.100	1 Dokumen	5.983.250	1 Dokumen	7.059.600	1 Dokumen	8.134.000	1 Dokumen	8.299.293	5 Dokumen	36.981.243	Bappeda	KKR
		15.2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	7.710.450	2 Dokumen	4.656.000	2 Dokumen	4.656.000	2 Dokumen	3.475.309	10 Dokumen	35.497.759	Bappeda	KKR
		15.3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	8.306.950	1 Dokumen	7.570.800	1 Dokumen	7.570.800	1 Dokumen	5.938.404	5 Dokumen	49.386.954	Bappeda	KKR
		15.4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	8.362.500	4 Dokumen	8.362.500	4 Dokumen	8.362.500	16 Dokumen	25.087.500	Bappeda	KKR
		15.5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-	2 Dokumen	14.065.500	2 Dokumen	6.912.950	2 Dokumen	8.469.800	2 Dokumen	8.469.800	2 Dokumen	7.461.096	10 Dokumen	45.379.146	Bappeda	KKR
		15.6.	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	-	-	-	1 Dokumen	9.843.100	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	9.843.100	Bappeda	KKR
		16.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	100%	134.830.430	100%	80.150.050	100%	102.676.000	100%	107.300.000	100%	114.798.301	100%	539.754.781	Bappeda	KKR
		16.1	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	-	2 Dokumen	124.830.430	2 Dokumen	62.480.050	2 Dokumen	62.420.000	2 Dokumen	62.624.000	2 Dokumen	52.704.280	10 Dokumen	365.058.760	Bappeda	KKR
		16.2.	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	-	-	-	1 Kegiatan	12.670.000	1 Kegiatan	35.080.000	1 Kegiatan	39.500.000	1 Kegiatan	57.703.735	4 Kegiatan	144.953.735	Bappeda	KKR
		16.3.	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	Jumlah dokumen penataan aset pada SKPD	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.176.000	1 Dokumen	5.176.000	1 Dokumen	4.390.286	5 Dokumen	24.566.286	Bappeda	KKR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing”**, Misi Kabupaten Kubu Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*);
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas;
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)
Tujuan 1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat
Tujuan 5 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah
Sasaran 15 : Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019
											Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (<i>Good Governance</i>)	T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai SAKIP	C	CC	CC	CC	B	B	B
4	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	T.5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	7	Tata ruang wilayah yang semakin baik	S.15	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	35	Ketaatan terhadap RTRW	60,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Bappeda, memuat antara lain tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Renstra Bappeda merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Bappeda dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Perubahan ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra Perubahan berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Bappeda Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya Renstra Perubahan ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja Bappeda akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Bappeda).

Apabila sampai berakhirnya Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2014-2019 ini, belum ditetapkannya Renstra Bappeda periode berikutnya, maka Renstra Perubahan Bappeda ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.